

Studi Evaluasi Penerapan Sistem Poin dalam Mendisiplinkan Siswa di SMAN 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota

Fadil Firmansyah¹, Desri Nora^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: desrinora@ymail.com.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan siswa setiap semester di SMAN 2 Bukik Barisan, khususnya setelah penerapan sistem poin dilaksanakan. Pada semester Januari-Juni 2022 total ada 219 pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran itu meningkat pada semester Juli-Desember 2022 menjadi 282 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Behavioristik yang dikemukakan Edward Lee Thorndike. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Bukik Barisan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan model evaluasi CIPP. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen dalam pengumpulan data. Pemeriksaan keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa belum sesuai dengan ketentuan dan teori yang ada. Pencatatan yang dilakukan hanya formalitas, belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling di sekolah. Penerapan sistem poin hanya berlaku pada awal semester Januari-Juni 2021, setelah itu tidak lagi dijalankan, hanya melakukan penerapan sanksi langsung kepada siswa berupa membaca Al-qur'an dan membersihkan pekarangan sekolah.

Kata kunci: Disiplin siswa; Evaluasi; Sistem poin.

Abstract

This research was motivated by an increase in disciplinary violations committed by students every semester at SMAN 2 Bukik Barisan, especially after the implementation of the point system was implemented. In the January-June 2022 semester, there were a total of 219 disciplinary violations committed by students and those violations increased in the July-December 2022 semester to 282 cases. This study aims to find out how the application of the point system in disciplining students at SMAN 2 Bukik Barisan. To analyze this study, researchers used the Behavioristic Theory put forward by Edward Lee Thorndike. This research was conducted at SMAN 2 Bukik Barisan. This type of research is qualitative with an evaluation research design. This study used interview, observation, and document analysis methods in data collection. Checking the validity of the author's data using source triangulation techniques, triangulation techniques, and time triangulation. The findings in the field show that the application of the point system in disciplining students has not been in accordance with existing provisions and theories. The recording carried out is only a formality, there has been no follow-up carried out by the Guidance Counseling teacher at school. The recording carried out is only a formality, there has been no follow-up carried out by the Guidance Counseling teacher at school. Administration that has not been well organized is also an obstacle in implementing the point system. The application of the point system only applies at the beginning of the January-June 2021 semester, after which it is no longer implemented, only applying direct sanctions to students in the form of reading the Qur'an and cleaning school.

Keywords: Evaluation; Point system; Student discipline.

How to Cite: Firmansyah, F. & Nora, D. (2023). Studi Evaluasi Penerapan Sistem Poin dalam Mendisiplinkan Siswa di SMAN 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota. *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*, 2(4), 322-331.



Pendahuluan

Pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari segala aspek kehidupan. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan manusia demi menunjang perannya di masa datang. Pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisinya. Peningkatan kualitas melalui mutu pendidikan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga Negara demokratis serta bertanggung jawab, seperti yang disebutkan dalam.

Sejalan dengan tujuan undang-undang di atas, diadirkanlah suatu undang-undang baru yang dapat memperkuat karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia yaitu dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 perihal Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada Satuan Pendidikan Formal Pasal 2 Ayat 1. Pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan saat ini, mengingat banyak permasalahan yang timbul justru dilakukan oleh beberapa pelajar di negeri ini, seperti fenomena mencontek, tawuran antar pelajar, dan kejadian-kejadian lain yang tidak mencerminkan perilaku seorang yang terpelajar (Soedarsono, 2013).

Pendidikan karakter bangsa merupakan tanggung jawab berbagai pihak, seperti orang tua, sekolah, masyarakat dan Negara (Ryan & Lickona, 1992). Sekolah sebagai institusi pendidikan formal harus dapat membantu mengantisipasi arus perubahan zaman. Di sekolah harus dibuat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat sekolah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sudah saatnya sekolah untuk memberlakukan sanksi tegas agar siswa tidak berani lagi untuk melakukan pelanggaran, dengan membuat sebuah program yang menuntut siswa untuk menjalankan kedisiplinan secara maksimal (Setyawan et al., 2017). Salah satu program sekolah yang dibentuk dalam mendisiplinkan siswa yakni dengan menerapkan sistem poin (Sari et al., 2023). Pembentukan sistem poin dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan bahwasannya sekolah/madrasah diharuskan menetapkan pedoman tata tertib untuk menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif (Desiyanto et al., 2018).

Sistem poin merupakan program yang dibuat oleh sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa (Fitriawati et al., 2017). Dalam sistem poin ini, berisi jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan peserta didik di lingkungan sekolah baik itu dalam hal kehadiran, keterlambatan, kerapian dan kedisiplinan beserta sanksi yang diterima dan penghargaan berupa angka. Siswa yang melanggar akan diberi hukuman berupa poin. Masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda sesuai dengan tingkat besar kecilnya pelanggaran, apabila siswa melakukan pelanggaran maka poinnya akan bertambah dan apabila siswa berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik poinnya akan berkurang (Chrismayanti et al., 2022).

Salah satu sekolah yang sudah menerapkan sistem poin adalah SMAN 2 Bukik Barisan. Program sistem poin sudah diterapkan selama kurang lebih 2 setengah tahun yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan bersama pihak sekolah. Siswa beserta orang tua sudah mengetahui penerapan sistem poin ini melalui sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah pada saat pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru (PLSBSB). Adapun tabel *teamwork* sistem poin yang diterapkan di SMAN 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. *Teamwork* Sistem Poin di SMAN 2 Bukik Barisan

No	Pelaksana	Tugas
1	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Wakil Kesiswaan	Penanggung Jawab
3	Guru Piket	Mencatat poin siswa
4	Wali Kelas	Penasihat siswa
5	Guru BK	Merekap poin serta pemberi sanksi

Sumber: Data olahan peneliti tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing *stakeholder* di SMAN 2 Bukik Barisan memiliki tugas masing-masing, namun beberapa kasus pelaksana yang seharusnya melaksanakan tugasnya dengan baik tidak bisa melakukannya, sehingga penerapan sistem poin yang ada di SMAN 2 Bukik Barisan belum membawa perubahan terhadap sikap disiplin siswa. Masih banyak siswa yang tidak patuh terhadap aturan dan tata tertib sekolah seperti siswa suka bolos pada saat jam pelajaran kosong, suka telat pergi ke sekolah, sering merokok di area sekolah, tidak melaksanakan tugas piket harian, sering keluar masuk kelas dan tidak

mengikuti kegiatan upacara bendera. Adapun kasus pelanggaran kedisiplinan siswa bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kasus Pelanggaran Kedisiplinan Siswa SMA N 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota

No	Bentuk Perilaku	Januari-Juni 2022	Juli–Desember 2022	Jumlah
1	Terlambat	89	117	206
2	Main game	2	1	3
3	Melawan ke guru	0	1	1
4	Cabut	8	10	18
5	Tidak ikut muhadarah	45	59	104
6	Tidak pakai atribut lengkap	28	31	59
7	Tidak ikut upacara bendera	47	63	110
Jumlah		219	282	501

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 2 Bukik Barisan 2023

Dari data pelanggaran kedisiplinan siswa di SMA N 2 Bukik Barisan menunjukkan bahwa peningkatan pelanggaran kedisiplinan tiap semester. Hal itu terjadi karena penerapan sistem poin di SMA N 2 Bukik Barisan tidak lagi sesuai dengan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMAN 2 Bukik Barisan, peneliti menemukan kesenjangan penerapan sistem poin terhadap rencana kegiatan yang sudah ditetapkan. Sistem poin yang telah dibuat belum sepenuhnya diterapkan, adanya keterbatasan tenaga konselor, guru, sarana dan prasarana juga menjadi hambatan. Di satu sisi sistem poin di SMAN 2 Bukik Barisan belum pernah di evaluasi. Hal ini dinyatakan oleh kepala sekolah dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 27 Maret 2023. Terkait fenomena tersebut untuk memperoleh gambaran tentang penerapan sistem poin di SMAN 2 Bukik Barisan, peneliti memandang sistem poin sebagai upaya mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu program kegiatan dalam mewujudkan tujuan program sekolah.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti et al., 2017) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Poin dalam Mengatasi Pelanggaran Tata Tertib Siswa Di MAN 1 Pontianak. Hasil penelitiannya menemukan bahwa 1) bentuk penerapan sosialisasi sistem poin yang diterapkan di MAN 1 Pontianak dalam banyak hal (a) awal masuk sekolah, (b) pembagian tata tertib kepada orang tua dan siswa, (c) tata kelola yang baik, (d) bimbingan wali kelas. 2) pelaksanaan hukuman melalui (a) teguran lisan, (b) teguran dan pencatatan ke dalam buku kasus, (c) teguran untuk orang tua dan pernyataan, (d) kembalikan ke orang tua. Secara keseluruhan sistem poin yang diterapkan di MAN 1 Pontianak sudah berjalan tetapi belum efektif.

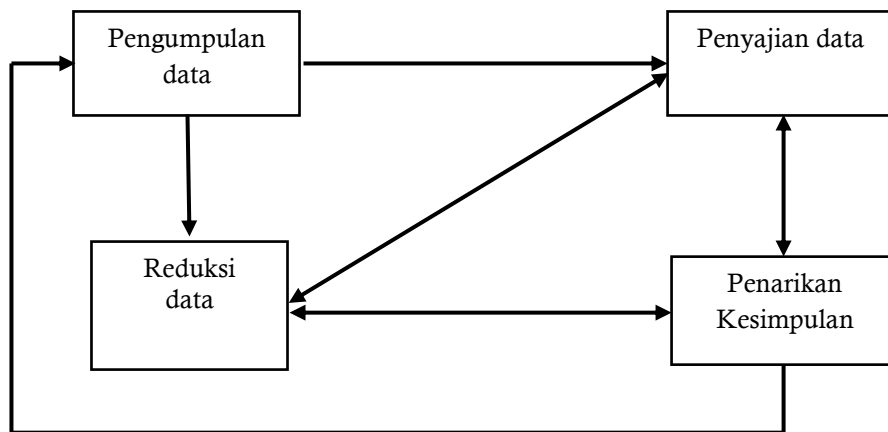
Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada fokus penelitian dimana sama-sama meneliti tentang penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa pada tingkat SLTA. Sedangkan perbedaan penelitian Wijayanti dengan yang peneliti lakukan yaitu peneliti melihat bagaimana evaluasi penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa, sedangkan penelitian wijayanti tidak melihat evaluasinya melainkan analisis terhadap penerapannya.

Berdasarkan observasi awal dan data yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Evaluasi Penerapan Sistem Poin Dalam Mendisiplinkan Siswa di SMAN 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi evaluatif dengan model evaluasi CIPP. Penelitian kualitatif dianjurkan untuk mengetahui fenomena sosial dengan data yang sedalam-dalamnya dari perspektif orang yang bersangkutan. Partisipan merupakan orang yang diwawancarai, dibidik, dan diharap untuk membagikan data, pandangan, pemikiran, atau tanggapan, baik secara individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2007). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan proses desain dan prosedur evaluasi dalam pengumpulan serta analisis data yang sistematis untuk menetapkan nilai atau manfaat praktik (Mudjiyanto, 2018). Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan tentang studi evaluasi penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota, peneliti menggunakan model CIPP Stufflebeam. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini karena 15 orang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah memberikan informasi terkait penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi

dokumentasi (Sugiyono, 2020). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut (Miles & Huberman, 1994). Analisis menurut Miles dan Huberman adalah (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan simpulan dan verifikasi.



Gambar 1. Analisis Data Kualitatif Sirajuddin Saleh Penerbit Pustaka Bandung

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota, dalam hal ini pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai instrumen utama, observasi, dan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian. Evaluasi penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota diaplikasikan dalam kegiatan sebagai berikut:

Evaluasi Context (Konteks) Program Sistem Poin

Landasan Hukum Penerapan Sistem Poin

Program sistem poin yang diterapkan di SMAN 2 Bukik Barisan adalah sebuah program sekolah yang dirancang berdasarkan keputusan bersama yang telah disepakati oleh seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan FD selaku Kepala SMAN 2 Bukik Barisan yang diwawancara di ruangan kepala sekolah mengatakan bahwa:

“...landasan hukum dalam sistem poin adalah peraturan bersama yang ditetapkan oleh seluruh majelis guru SMAN 2 Bukik Barisan atau peraturan sekolah yang dibuat bersama-sama majelis guru yang ada di SMA kita...”(Wawancara tanggal 22 Mei 2023).

Hal yang sama mengenai landasan hukum penerapan sistem poin juga disampaikan oleh informan SF selaku waka kesiswaan yang di wawancara di dalam ruangan majelis guru SMAN 2 Bukik Barisan yang mengatakan:

“...landasan hukum dalam sistem poin adalah program yang dibuat oleh sekolah, dimana program ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama majelis guru yang ada di sekolah...”(Wawancara tanggal 22 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang digunakan dalam penerapan sistem poin di SMAN 2 Bukik Barisan adalah suatu peraturan yang dibuat oleh sekolah secara bersama-sama dengan majelis guru yang ditetapkan di SMAN 2 Bukik Barisan yang merujuk kepada UU no 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Dengan keputusan bersama serta merujuk pada UU tersebut maka sistem poin bisa diterapkan di SMAN 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota.

Latar Belakang Penerapan Sistem Poin di SMAN 2 Bukik Barisan

Program sistem poin di SMAN 2 Bukik Barisan sebelumnya sudah direncanakan pada masa kepemimpinan Bapak Jamaludin, S.Pd namun baru terealisasi pada masa kepemimpinan Bapak Firdaus, S.Pd., M.M tepatnya pada Januari-Juni tahun ajaran 2021/2022. Penerapan sistem poin ini berlatarbelakang dari meningkatnya kasus pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa semenjak adanya covid-19, ketika siswa kembali ke sekolah dengan pembelajaran tatap muka, siswa sering melanggar

kedisiplinannya, sehingga wakil kesiswaan dan pembina osis merancang untuk membuat program sistem poin. Hal ini senada yang disampaikan oleh informan FD, selaku kepala sekolah SMAN 2 Bukik Barisan menyatakan bahwa:

“...latar belakang penerapan sistem poin ini didasari oleh pengalaman kehadiran siswa yang mulai rendah, serta diperkuat oleh kehadiran covid-19 yang membuat disiplin siswa menurun. Berdasarkan fenomena di atas maka wakil kesiswaan beserta pembina osis membuat program sistem poin...” (Wawancara tanggal 22 Mei 2023)

Sejalan dengan itu sebagaimana yang diungkapkan oleh informan YA selaku guru BK SMAN 2 Bukik Barisan dalam wawancara mengatakan bahwa :

“...latar belakang penerapan sistem poin ini adalah untuk mengurangi tingkat pelanggaran tata tertib oleh siswa, karena siswa SMAN 2 Bukik Barisan selama ini tidak peduli terhadap kedisiplinannya. Mereka sering terlambat datang ke sekolah dengan berbagai macam alasan. Maka dari itu dilakukanlah pencatatan terhadap siswa yang melanggar aturan ini supaya mereka tidak melakukannya lagi di hari berikutnya. Karena alasan tersebut, pihak sekolah berinisiatif untuk membuat program sistem poin ini...” (Wawancara tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang penerapan sistem poin di SMAN 2 Bukik Barisan karena pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa setiap hari semakin meningkat, apalagi semenjak adanya wabah covid-19 yang membuat tingkat kedisiplinan siswa menjadi rendah. Seperti datang terlambat ke sekolah dan masuk ke pekarangan sekolah dengan sesuka hati mereka, untuk itu dibuatlah sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran tata tertib dan mempermudah penanganan terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa dengan diterapkan oleh seluruh guru terutama guru piket yang bertugas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti simpulkan bahwa latar belakang penerapan sistem poin di SMAN 2 Bukik Barisan yaitu karena adanya wabah covid-19 yang membuat tingkat kedisiplinan siswa yang rendah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kristian..et al, 2022) dengan judul penelitian “*Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja*”. Penelitian ini menemukan latar belakang penerapan sistem poin untuk menegakkan disiplin siswa dan mempermudah penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa.

Hal ini tentunya memiliki persamaan dengan yang peneliti temui di SMAN 2 Bukik Barisan dimana sistem poin yang diterapkan untuk mengurangi tingkat pelanggaran tata tertib siswa. Sedangkan untuk perbedaannya, pada penelitian yang sudah peneliti lakukan, peneliti ingin mengevaluasi penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa.

Tujuan Penerapan Sistem Poin di SMAN 2 Bukik Barisan

Tujuan penerapan sistem poin di SMAN 2 Bukik Barisan adalah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, mempersiapkan anak menjadi siswa yang disiplin, mengurangi pelanggaran kedisiplinan, mempermudah dalam penanganan terhadap pelanggaran tata tertib siswa dan membuat efek jera untuk siswa yang tidak mematuhi peraturan sebagaimana yang dituturkan oleh informan SF selaku wakil kesiswaan mengatakan bahwa:

“...tujuan penerapan sistem poin ini adalah mempermudah penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, untuk memperjelas dalam pemberian sanksi dan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam diri siswa, mempersiapkan siswa untuk menjadi anak disiplin, baik di sekolah maupun untuk memasuki dunia kerja ...” (Wawancara tanggal 23 Mei 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh informan KH selaku guru Biologi dan guru piket pada saat peneliti melakukan wawancara, mengatakan bahwa :

“...penerapan sistem poin ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa, karena sistem poin ini memiliki sanksi. Diharapkan dari sanksi tersebut memberikan efek jera kepada siswa, sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang ada di sekolah lagi. Namun ibuk melihat sanksi yang diberikan hanya kepada siswa yang terlambat, dan hanya disuruh untuk membersihkan pekarangan sekolah lalu diberi izin masuk. Untuk perekapannya tidak dilakukan lagi, sehingga berapa poin yang didapatkan oleh siswa tidak jelas...” (Wawancara tanggal 23 Mei 2023).

Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan sistem poin diterapkan di SMAN 2 Bukik Barisan adalah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, mempersiapkan anak menjadi siswa yang disiplin baik di sekolah maupun di dunia kerja nantinya, mengurangi pelanggaran kedisiplinan, mempermudah dalam penanganan terhadap pelanggaran tata tertib siswa dan membuat efek jera untuk siswa yang tidak mematuhi peraturan dari poin sanksi yang telah mereka dapatkan.

Kesesuaian tujuan program sistem poin dengan kebutuhan siswa

Sasaran utama program sistem poin adalah siswa, oleh karena itu dalam penerapan sistem poin sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa agar siswa senantiasa berperilaku sesuai dengan aturan dan bisa menjadi teladan untuk siswa yang lainnya, hal itu sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan FD selaku Kepala Sekolah, mengatakan bahwa:

“...program sistem poin ini sangat berguna bagi siswa, melalui sistem poin diharapkan siswa yang semulanya tidak pernah taat aturan menjadi patuh karena salah satu kunci kesuksesan yang harus dimiliki oleh anak yaitu harus disiplin dan taat aturan...”(Wawancara tanggal 23 Mei 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh informan SF selaku wakil kesiswaan dalam wawancara di ruangan majelis guru mengatakan bahwa :

“...siswa di SMA kita banyak yang belum disiplin dalam proses pembelajaran, bapak sangat setuju jika sistem poin menjadi salah satu komponen dari strategi mendisiplinkan siswa, bisa mengajarkan kepada siswa tentang tanggung jawab dan sistem poin ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki perilakunya...”(Wawancara tanggal 23 Mei 2023)

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan terdapat kesesuaian antara tujuan penerapan sistem poin dengan kebutuhan siswa dimana landasan hukum dalam penerapan sistem poin yang jelas, serta latar belakang dan tujuan diterapkan sistem poin ini juga untuk mendisiplinkan. Adanya tujuan yang jelas dari penerapan sistem poin tersebut membuat sistem poin menjadi salah satu komponen dalam mewujudkan kebutuhan siswa. siswa yang tidak pernah disiplin dalam pelajaran, akan dituntut untuk disiplin karena adanya sistem poin ini.

Evalusi Input (Masukan) Program Sistem Poin

Kontribusi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang membantu penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa ini yakni semua *stakeholder* di sekolah, seperti kepala sekolah, majelis guru, karyawan dan karyawan. Hal tersebut dikuatkan oleh kutipan wawancara peneliti dengan informan FD selaku kepala SMAN 2 Bukik Barisan mengatakan:

“...dalam menjalankan program sistem poin ini, sebetulnya semua pihak harus terlibat, namun karena kasus pelanggaran siswa yang banyak terjadi adalah terlambat datang ke sekolah. Oleh karena itu, untuk menjalankan pencatatan terhadap pelanggaran ini dilakukan oleh guru piket. Guru piket yang sudah diatur oleh sekolah harus mengemban amanah dan bisa melakukan pencatat terhadap siswa yang terlambat. Selanjutnya yang terlibat adalah guru mata pelajaran dan wali kelas, apabila guru piket ini tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran kedisiplinan siswa...” (Wawancara tanggal 22 Mei 2023)

Keterangan serupa juga disampaikan oleh informan YA selaku guru PPKN dan guru piket, mengatakan bahwa:

“...yang bertanggung jawab dalam penerapan sistem poin ini adalah guru piket namun sumber daya dalam penerapan sistem poin ini masih kurang, guru yang sudah di buat jadwalnya masih ada yang tidak melakukan tugas dengan baik. Terlebih pada hari jum'at dan senin, karena ada upacara bendera dan muhadarah. Kami kewalahan mengatur peserta didik yang terlambat, belum lagi sambil mencatat nama-nama siswa yang terlambat tersebut...” (Wawancara tanggal 23 Mei 2023).

Dari hasil wawancara informan di atas dan pengamatan langsung di lapangan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang berperan pada program penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan Lima Puluh Kota ialah guru piket, guru mata pelajaran dan wali kelas. Terutama kepada guru piket, karena guru piket yang akan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pembelajaran, namun masih terdapat beberapa guru piket yang belum melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang sudah diamanahkan untuknya. Selain guru piket, kepala sekolah dan wakil kesiswaan

juga sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan sistem poin ini, bagaimana memantau dan memastikan sistem poin tersebut berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Apabila terdapat guru yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, kepala sekolah memberikan peringatan dan sanksi langsung kepada guru yang bersangkutan.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung sistem poin ini adalah pagar pembatas, parkir dan administrasi pencatatan namun sarana dan prasarana tersebut masih belum lengkap di SMAN 2 Bukik Barisan, hal tersebut diperkuat oleh observasi dan wawancara dengan informan EH selaku wakil sarana dan prasarana berikut ini:

“...sarana dan prasarana untuk mendukung program sistem poin ini belum lengkap, karena sekolah kita belum memiliki pagar pembatas. Sekolah hanya memiliki gerbang saja di depan, untuk pagar masih diusahakan, karena yang belakang ini adalah SD, jadi siswa SMA bercampur dengan SD ketika mereka jajan...” (Wawancara tanggal 23 Mei 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh informan YS selaku guru piket mengatakan bahwa :

“...sekolah kita belum memiliki pagar pembatas sehingga siswa yang terlambat masih bisa masuk ke lingkungan sekolah...” (Wawancara tanggal 23 Mei 2023)

Berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan sistem poin ini belum tersedia secara lengkap, hanya beberapa sarana dan prasarana saja yang ada karena SMAN 2 Bukik Barisan belum memiliki pagar pembatas sebagai sarana pendukung utama untuk kelancaran penerapan sistem poin ini. Ketidakadaan sarana prasarana pendukung dalam penerapan sistem poin membawa tantangan tersendiri bagi SMAN 2 Bukik Barisan. Sarana dan prasarana yang belum ada akan tetap diusahakan oleh wakil prasarana dan sarana untuk membangunnya dengan melibatkan komite serta unsur terkait.

Evaluasi Process (Proses) Program Sistem Poin

Waktu dan proses penerapan sistem poin

Penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan dimulai pada semester Januari-Juni 2021 setelah adanya keputusan bersama yang ditetapkan oleh sekolah dan program sistem poin ini masih berlanjut sampai saat sekarang ini, tetapi masih banyak hal yang harus diperbaiki karena tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh guru BK. Data ini diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan informan SF selaku wakil kesiswaan :

“...program sistem poin sudah kita laksanakan lebih kurang 2 setengah tahun, sejauh ini tetap kita usahakan sistem poin ini bisa diterapkan sebagaimana seharusnya, walaupun dalam beberapa kasus masih melakukan diskusi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Penerapan sistem poin ini juga harus lebih ditingkatkan, bagaimana guru harus terbiasa dengan pemberian poin dan bagaimana anak terbiasa dengan adanya poin tersebut...” (Wawancara tanggal 24 Mei 2023).

Hal senada diungkapkan oleh informan ZF (siswa kelas XI IPS) mengatakan bahwa :

“saya belum mengetahui sudah berapa poin yang saya dapatkan pak, karena selama ini tidak ada disampaikan oleh guru piket. Setiap saya melakukan pelanggaran saya hanya disuruh oleh guru piket untuk membaca al-qur'an dan membersihkan lingkungan sekolah saja pak”. (Wawancara tanggal 24 Mei 2023).

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan di atas dan pengamatan peneliti selama observasi di SMAN 2 Bukik Barisan bisa disimpulkan bahwa penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa belum berjalan dengan baik, sistem poin yang ada di SMAN 2 Bukik Barisan masih baru sehingga masih dalam proses belajar. Penerapan sistem poin di SMAN 2 Bukik Barisan hanya dilakukan pada awal program ini dibuat, setelahnya program ini tidak lagi diterapkan kepada peserta didik. Siswa tidak mengetahui berapa poin yang didapatkan dan mereka hanya menerima sanksi langsung dari guru piket pada saat terlambat datang ke sekolah serta tidak ada perubahan perilaku yang telah ditampilkan oleh siswa.

Faktor Penghambat Penerapan Sistem Poin

Faktor penghambat yang sering muncul pada penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan adalah sistem administrasi pencatatan yang belum sempurna dan guru yang tidak

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan informan YA selaku guru BK mengatakan sebagai berikut:

“...salah satu kendala atau hambatan yang ditemukan adalah pada administrasi yang belum tertata secara sempurna, karena program sistem poin ini baru, dan rekapitulasinya belum terarah, hanya sebatas catatan pada buku siswa siswa saja untuk saat sekarang ini...” (Wawancara tanggal 24 Mei 2023)

Selanjutnya informan KH selaku guru biologi juga menyampaikan bahwa :

“...faktor penghambat sistem poin ini adalah ketidak jelasan sistem perekapannya. Cuma ya itu, setelah di catat di buku kasus, gak di rekap. Ya udah, gak tau poin anak udah berapa dan jadinya gak ada tindak lanjut...” (Wawancara tanggal 24 Mei 2023)

Dari beberapa wawancara dengan informan dan pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penerapan sistem poin adalah rekapitulasi sistem poin belum terarah, perekapan dan tindak lanjut sistem poin belum jelas. Guru piket yang membuat poin untuk siswa tidak menuliskannya dibuku kasus serta guru BK yang seharusnya merekap poin yang didapatkan oleh siswa tidak dijalankan dengan baik, artinya koordinasi antara guru BK dengan guru piket masih kurang berjalan dengan baik serta monitoring dari unsur pimpinan juga tidak ada, kepala sekolah dan wakil kesiswaan tidak melihat secara berkala bagaimana *progres* yang terjadi dari penerapan sistem poin ini.

Evaluasi Product (Produk) Program Sistem Poin

Pencapaian Program

Pencapaian program sistem poin bisa dilihat dari tingkat pelanggaran kedisiplinan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan yang selalu meningkat setiap semester, hal itu membuktikan bahwa belum tercapainya program sistem poin sesuai dengan rencana awal yang sudah ditetapkan. Guru piket hanya memberikan sanksi langsung kepada siswa serta poin yang didapatkan oleh siswa tidak pernah dicatat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan MS selaku guru piket dan guru Bahasa Indonesia:

“...buku pencatatan kasus pelanggaran siswa saya lihat tidak pernah direkap oleh guru BK, berapa total poin yang telah didapatkan oleh siswa pun tidak tau karena sekolah selama ini tidak pernah mengeluarkan siswa atau memanggil orang tua siswa yang telah sampai total poin yang ditentukan...” (Wawancara tanggal 25 Mei 2023)

Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan informan KH selaku guru piket mengatakan bahwa:

“...selama ibuk menjadi guru piket tidak ada satupun guru yang membuat poin apabila siswa tidak disiplin. Guru hanya memberikan sanksi langsung kepada siswa, sehingga siswa yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran kedisiplinan merasa biasa saja terhadap sanksi yang diberikan. Misalnya sekarang dia terlambat dan hanya disuruh baca Al-qur'an, besoknya dia terlambat lagi dan kejadian itu ibuk perhatikan selalu berulang kali dilakukan oleh siswa. Ibuk belum melihat apa pencapaian dari program sistem poin ini, siswa hanya menerima sanksi langsung, bukan menerima poin dari pelanggaran kedisiplinan yang mereka lakukan...” (Wawancara tanggal 25 Mei 2023)

Dari hasil wawancara dari informan di atas bisa disimpulkan bahwa pencapaian program ini belum maksimal karena poin yang didapatkan oleh siswa tidak pernah dicatat. Guru piket hanya memberikan sanksi langsung kepada siswa, bukan memberikan poin sesuai dengan bobot pelanggaran yang telah mereka lakukan sehingga guru BK tidak bisa menindaklanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa. Inti dari penerapan sistem poin ini, berhasil atau tidaknya apabila guru piket, guru BK, kepala sekolah serta wakil kesiswaan saling berkoordinasi dengan baik. Bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mereka jalankan sesuai standar yang sudah ditetapkan.

Dampak Program

Dampak diterapkannya sistem poin ini adalah membawa pengaruh positif terhadap kedisiplinan siswa di sekolah karena siswa yang menyalahi peraturan dan tata tertib sekolah melihat bahwa ada poin yang mereka terima setelah melakukannya. Hal itu menjadi pertimbangan bagi siswa untuk melakukan pelanggaran kembali. Data tersebut diperkuat oleh wawancara penulis dengan informan YA selaku Guru BK mengatakan:

“...penerapan program sistem poin cukup berdampak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa karena dalam pelaksanaannya masih dalam jangka yang belum lama, jadi maklum masih sedikit perubahan yang terlihat pada perilaku siswa untuk disiplin, karena masih perlu evaluasi

dan perbaikan dalam banyak hal. Awalnya sekolah memberlakukan sistem takut terlebih dahulu, kemudian jadi kebiasaan dan menjadi *habbit* yang baik bagi siswa ...” (Wawancara tanggal 25 Mei 2023).

Lebih lanjut Informan YS selaku guru piket juga mengatakan bahwa :

“...dampak setelah diterapkan sistem poin adalah siswa yang punya kesadaran untuk menaati aturan sudah bisa berubah, dan yang belum punya kesadaran masih juga melanggar...” (Wawancara tanggal 25 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dan observasi peneliti, dapat ditarik sebuah pemahaman dan kesimpulan bahwa dampak diterapkannya program sistem poin membawa perubahan terhadap kedisiplinan siswa walaupun tidak secara keseluruhan. Siswa yang selalu melanggar aturan disebabkan oleh karakter siswa yang memang sulit dibentuk karena siswa masih cenderung mengikuti kemodernan zaman yang terus berubah-ubah. Perubahan sikap siswa tersebut hanya terlihat pada awal penerapan program ini, setelah program ini tidak ada tindak lanjutnya, siswa tetap mengulangi pelanggaran yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Permasalahan tersebut dapat di analisis dalam teori Behavioristik oleh Edward Lee Thorndike dengan asumsi dasar teori adalah tingkah laku manusia sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Seperti pada penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan, perilaku siswa akan menunjukkan sikap disiplin apabila aturan sistem poin diterapkan secara tegas. Siswa akan berperilaku disiplin apabila menerima penghargaan dan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya dan siswa akan menghentikan suatu tingkah laku, karena tingkah laku tersebut belum diberi *reward* (hadiah) atau telah mendapat *punishment* (hukuman), karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat ataupun yang merusak, merupakan tingkah laku dipelajari (Hermansyah et al., 2020). Seperti yang terlihat di SMAN 2 Bukik Barisan, sistem poin yang diterapkan belum memiliki kontribusi terhadap kedisiplinan siswa, hal itu terlihat dari pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa meningkat setiap semester. Guru piket yang menindaklanjuti proses pelanggaran kedisiplinan siswa hanya memberikan sanksi langsung, sehingga siswa tidak memberikan efek jera untuk siswa. Berikut hukum yang dikemukakan oleh Thorndike terjadinya asosiasi antara sitimulus dan respon yaitu :

Pertama hukum kesiapan (*Law of Readness*). Sebelum belajar dibutuhkan kesiapan dari individu agar tercipta stimulus dan respon, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Guru selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk selalu menjaga kerapian diri seperti memotong rambut, memasukkan baju kedalam celana, memakai ikat pinggang. Peserta didik akan merasa nyaman dan siap menerima pembelajaran jika persiapan yang dilakukan oleh peserta didik sudah sempurna, dengan tidak melanggar aturan dan tata terbit akan membuat peserta didik lebih siap untuk memulai pembelajaran di pagi harinya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kedua hukum latihan (*Law of Exercise*) yaitu belajar akan berhasil apabila diulang-ulang. Artinya apabila guru sudah memberikan penguatan yang sama kepada siswa secara terus-menerus serta mencatat berapa poin yang diperoleh atas pelanggaran yang dilakukan, maka siswa tidak akan berani melakukan pelanggaran lagi. Seperti yang dikatakan Thorndike bahwa prinsip utama belajar adalah pengulangan, maka semakin sering guru memberikan poin atas pelanggaran siswa maka siswa tidak akan melakukan pelanggaran, sebaliknya semakin lemah guru dalam pemberian poin terhadap pelanggaran siswa tersebut maka perilaku tidak disiplin yang dilakukan oleh siswa akan semakin berlanjut.

Ketiga hukum akibat (*Law of Effect*) yaitu menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung akibat yang didapatkan. Seseorang mendapat respon yang menyenangkan, maka respon tersebut dipertahankan, sebaliknya seseorang mendapat respon yang tidak menyenangkan akan dihentikan atau tidak akan diulangi lagi. Dalam penerapan sistem poin, respon yang diberikan oleh guru menyenangkan siswa, sehingga pelanggaran kedisiplinan yang dilakukannya tetap akan dipertahankan, apabila guru memberikan respon yang sepadan terhadap pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa, maka siswa tersebut akan menghentikan perilakunya. Dalam hal penerapan sistem poin di SMAN 2 Bukik Barisan selama ini siswa memberikan respon yang berulang yakni terus melakukan pelanggaran kedisiplinan karena respon yang diberikan mendatangkan kesenangan, bukan mendapatkan akibat dari pelanggaran yang dilakukannya. Sebagaimana yang dikatakan Thorndike perbuatan yang cenderung membuahkan hasil yang menyenangkan akan dipertahankan dan diulang.

Thorndike pada hukum kesiapan, belajar akan berhasil apabila peserta didik atau individu memiliki kesiapan didalam dirinya. Kesiapan disini maksudnya, dari rumah sudah rapi, datang tidak terlambat ke sekolah, sampai di sekolah langsung masuk kelas, akan membuat siswa lebih siap daripada peserta didik melanggar aturan. Peserta didik yang melanggar aturan menandakan bahwa dia tidak siap untuk menerima pembelajaran di sekolah.

Keempat hukum sikap (*Law of Attitude*) tingkah laku seseorang juga dipengaruhi oleh emosi, sosial, kognitif dan psikomotor dari individu itu sendiri. Perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh stimulus dan respon saja melainkan juga ditentukan dari individu itu sendiri. Maka dari itu seseorang akan memunculkan reaksi yang berbeda-beda meski mendapatkan perlakuan yang sama dari guru, tergantung watak, latar belakang kehidupan dan kondisi emosional masing-masing. Dalam penerapan sistem poin, bukan hanya tergantung respon yang diberikan guru, tetapi juga bagaimana individu siswa itu sendiri bisa menerima sistem poin untuk berperilaku sesuai dengan aturan.

Berdasarkan uraian di atas, kenyataannya menunjukkan dengan penerapan sistem poin di SMAN 2 Bukik Barisan belum mampu mengubah perilaku siswa karena stimulus yang diberikan oleh guru membuat siswa merasa senang sehingga mereka tidak ingin meninggalkan perilaku yang sudah berulang kali mereka lakukan. Stimulus yang diberikan guru adalah segala sesuatu bentuk yang diberikan untuk memancing siswa berfikir, seperti memberikan contoh teladan dengan guru berpakaian rapi ke sekolah. Respon sementara itu adalah reaksi dari peserta didik atas stimulus yang diterima.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang studi evaluasi penerapan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di SMAN 2 Bukik Barisan dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem poin berbeda dengan ketentuan yang seharusnya dan teori yang ada. Diantaranya guru tidak melakukan pencatatan poin terhadap pelanggaran kedisiplinan siswa dan hanya memberikan sanksi langsung sehingga siswa merasa senang dan mereka tidak ingin meninggalkan perilaku tidak disiplin yang sudah berulang kali mereka lakukan. Dari pemberian stimulus dan respon yang diberikan oleh guru terhadap siswa yang berbeda dengan teori dan ketentuan yang ada tersebut membuat pelanggaran kedisiplinan di SMAN 2 Bukik Barisan selalu meningkat setiap semester.

Daftar Pustaka

- Chrismayanti, C., Agus, A.A., & Sudirman, M. (2022). Penerapan Sistem Poin Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik Di UPT SMAN 5 Tana Toraja. *Tomalebbi*, 9(4), 243-248.
- Desiyanto, J., Pantiwati, Y., & Tinus, A. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Upaya Membentuk Siswa Berkarakter SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 86-100.
- Fitriawati, C., Sulistiyorini, S. & Parijo, P. (2017). Penerapan Sistem Poin Dalam Menanggulangi Siswa Yang Melanggar Aturan di SMA N 2 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4(6), 1-11.
- Hermansyah, H. (2020). Analisis teori behavioristik (Edward Thorndike) dan implementasinya dalam pembelajaran SD/MI. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 7(1), 15-25.
- Miles, M. & Huberman, H. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. UK: Sage.
- Mudjiyanto, B. (2018). Metode penelitian evaluasi komunikasi. *Promedia*, 4(1), 76-102.
- Nasional, U. S. P. (1982). Introduction and Aim of the Study. *Acta Paediatrica*, 71, 6-6.
- Ryan, K., & Lickona, T. (1992). *Character development in schools and beyond*. Washington DC: The Council for Research in Values Phylosophy.
- Salah, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Setyawan, D., Astuti, E. S., & Ekojono, E. (2017). Sistem Pencatatan Poin Pelanggaran Siswa Pada Sma Negeri 1 Purwosari. *Jurnal Informatika Polinema*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.33795/jip.v1i1.84>
- Soedarsono, S. (2013). *Karakter Mengenal Bangsa Gelap Menuju Terang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, S. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Bandung*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Wijayanti, A. T., Sulistyarini, & Imran. (2017). Analisis Penerapan Sistem Poin dalam Mengatasi Pelanggaran Tata Tertib Siswa di MAN 1 Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 6(10), 1-8. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/21563/17449>
- Sari, W. P., Ilmi, D., Iswantir, M., & Jasmienti, J. (2023). Pelaksanaan Kedisiplinan Siswa Melalui Sistem Poin di SMA Negeri 2 Kec. Bukik Barisan. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(1), 179-205.